

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. 2010. Bandung : Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Effendi, Junaedi. Dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Gozali, Djoni Sumardi, 2021, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009)
- PhilipusM. Hadjon, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul. Dkk. 2016. *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Santoso, Aris P.A. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Waluyo. Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI/TESIS :

Ahdi, Waliyul. 2019. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)”(Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pahlevi, Andi Reza. 2016. “Efektifitas Penerapan Sanksi Mengenai Larangan Parkir Dibahu Jalan di Kota Makassar”(Skripsi). Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum. Universitas Hassanudin Makassar.

JURNAL/ARTIKEL :

Agus, A, dkk. 2016. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar. Firma Umar/Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2. 2016, 56.

Aswariningsih, Yelli. 2019. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas. Varian Hukum, Edisi No. XL Tahun XXXI Maret 2019.

Farida, Ida, dkk. 2021. Analisis Hukum Sistem Parkir Pada Bahu Jalan (*On Street Parking*) Dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Ciamis. *Case Law*.

Hendri, Jhon, dkk. 2020. Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.

Kamil, Firmanilah, dkk. 2023. Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Parkir Di Ruas Jalan Merdeka Kabupaten Ketapang. *Jurnal Konstruksi dan*

Infrastruktur.

Wahyono, Dwi, dkk. 2022. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.

Yusuf, Khasani, dkk., “Analisis Sistem Parkir Di Badan Jalan (On Street Parking) Terhadap Kelancaran Berlalu Lintas Di Jalan Gonilan-Pabelan (Implementasi Dari Mata Kuliah Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan)”, *Jurnal Garuda*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)

Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. (Berita Negara No. 372 Tahun 2023)

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. ((Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16)

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten 35 Tabanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12)

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 36)

INTERNET/WEBSITE:

FHukum Unpatti. 2011. "Asepek Teori Kewenangan Pemerintah." Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

Korps Lantas, Mabes Polri. 2021. "Polisi Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2021". Diakses Pada Tanggal 5 September 2023. polri.go.id : POLANTAS- DALAM-ANGKA-TAHUN-2021.pdf (polri.go.id).

Lesmana, Teddy. Nusa Putra University. 2021. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial." Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Tim, Hukumonline. 2023. "Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia". Diakses Pada Tanggal 5 September 2023. [Hukum Online.com : https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ccdcc5a907afa75aJmltdHM9MTY5Mz](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ccdcc5a907afa75aJmltdHM9MTY5Mz)

Ziaggi. 2021. "Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya." Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023.

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Faktor-Faktor_Penghambat_dalam_Penegakkan_Hukum

MKRI. 2011. *“Pemerintah: Izin Presiden Untuk Penyidikan Kepala Daerah Sesuai Konstitusi.”* Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2024
<https://www.mkri.id/index.php?id=6009&menu=2&page=web>.

